



LAPORAN HASIL RAPAT KERJA

PANSUS I

DPRD KABUPATEN BATANG

PEMBAHAS LKPJ BUPATI BATANG

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

UNTUK PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

PEMERINTAHAN DAERAH

*Disampaikan pada hari :
Rabu, 20 April 2016*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2016



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA

**PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGUNGJAWABAN BUPATI BATANG TAHUN 2015**

NOMOR: /DPRD. PANSUS.I/IV/2016

I. PENDAHULUAN

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dibentuk dalam rangka membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015 yang hasil pembahasan tersebut berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan dan/atau rekomendasi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/5 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten batang Nomor : 172.1/4 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Pembahas LKPJ Bupati Batang Tahun 2015, Panitia Khusus I bertugas membahas materi LKPJ Bupati Batang yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah.

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang didasarkan pada :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.3/1 Tahun 2016 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Sidang 2015 - 2016 Masa Persidangan II bulan Maret - Mei 2016.
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Pembahas LKPJ Bupati Batang Tahun 2015;

B. WAKTU DAN TEMPAT

1. Rapat Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang sesuai jadwal dilaksanakan 18 - 20 April 2016.
2. Tempat pelaksanaan Rapat Kerja di Ruang Rapat Kepanitiaan DPRD Kabupaten Batang.

C. PESERTA RAPAT KERJA

Peserta Rapat Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang adalah Pimpinan dan Anggota Pansus I, serta SKPD terkait yang menangani Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Adapun peserta yang hadir, baik dari Pansus I maupun SKPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Materi Pembahasan

Materi pembahasan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang adalah Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.

B. Hasil Pembahasan

Setelah Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang mempelajari, mençermati dan membahas materi LKPJ Bupati Batang, serta mendengarkan pemaparan dari beberapa SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib, maka secara garis besar dapat disimpulkan dan dilaporkan sebagai berikut :

1. URUSAN PENDIDIKAN

- Pada Bab IV Tabel 4.1 Buku LKPJ, laporan kinerja urusan pendidikan pada SKPD Dinas Pendidikan untuk 5 titik pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menunjukkan target kinerja sudah cukup baik, sedangkan dari 7 titik Fokus Layanan Urusan Wajib terdapat 4 titik yang capaian kinerjanya masih rendah dan perlu ditingkatkan, yaitu :
 - 1) Ratio guru terhadap murid;
 - 2) Ratio guru terhadap murid per kelas rata-rata (%);
 - 3) Angka putus sekolah;
 - 4) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4;

Khusus untuk permasalahan tingginya angka putus sekolah, Pansus berharap angka putus sekolah ini dapat ditekan, kalau ada yang putus sekolah agar Dinas dapat menyalurkan agar bisa sampai dengan lulus kejar paket C, agar tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Batang yang tidak lulus SMP.



2. URUSAN KESEHATAN

Dari laporan kinerja sesuai Tabel 4.9 dalam Bab IV buku LKPJ Bupati Batang dapat terbaca bahwa Urusan Kesehatan mencatat banyak kemajuan dalam pencapaian kinerjanya. Namun demikian, ada 1 (satu) indikator kinerja fokus layanan urusan wajib yaitu kasus kematian ibu melahirkan, yang meskipun sudah meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 23 kali kasus kematian, ditahun 2015 ini target 18 kali kasus kematian ibu realisasinya hanya terjadi 13 kali kasus kematian ibu melahirkan. Namun angka tersebut masih perlu mendapatkan perhatian serius, karena 13 kali kasus kematian ibu melahirkan dalam 1 tahun masih merupakan angka yang mengkhawatirkan. Sehingga sedapat mungkin untuk bisa ditekan dengan lebih meningkatkan penanganan kesehatan di tingkat Puskesmas Rawat Inap maupun Puskesmas Rawat Jalan.

3. URUSAN PERTANAHAN

Dari laporan kinerja Tabel 4.118 Realisasi pelaksanaan program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kegiatan Penatausahaan dan pensertifikatan tanah aset Pemda, meskipun terbaca capaian realisasi anggarannya berada pada kategori tinggi (92 %) dan capaian kinerjanya berada pada kategori sangat tinggi (150 %), namun kenyataannya masih banyak tanah Pemda yang pengurusan pensertifikatannya bertahun-tahun tidak selesai dan terkatung-katung. **Ini menjadi catatan bahwa Pemda "tidak open/perhatian" pada kepemilikan aset tanahnya.**

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

- **Appreciate** untuk capaian rata-rata urusan pekerjaan umum yang didasarkan pada rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator program kegiatan adalah 100 % yang masuk dalam kategori sangat tinggi, sementara rata-rata capaian kinerja pada aspek anggaran yang didasarkan pada program kegiatan adaklah 95,09 % yang juga masuk dalam kategori sangat tinggi, namun perlu dicatat bahwa masih banyak pengaduan terhadap kinerja DBM-SDA yang terbilang lamban dalam mekanisme proses pencairan anggaran terkait pihak ketiga yang sampai "molor" ke tahun anggaran berikutnya. **Ini menjadi catatan agar mekanisme proses pencairan anggaran ini perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan pihak ketiga.**
- Terkait pembangunan jalan desa yang menjadi kewenangan Desa dan bukan menjadi kewenangan Dinas Tekhnis masih terjadi adanya **mis persepsi** diantara pejabat pada tingkat pimpinan SKPD. **Ini catatan agar kedepan tidak terjadi lagi statemen yang berbeda dan saling bertentangan.**



5. Secara keseluruhan, pembahasan Buku LKPJ Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Urusan Wajib yang dilaksanakan, **selain Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pertanahan dan Urusan Pekerjaan Umum** sudah cukup lengkap menggambarkan seluruh indikator kinerja sesuai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat diterima.

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Urusan Wajib yang sudah baik dan dapat diterima yaitu terdiri dari : URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN PENATAAN RUANG, URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN PERUMAHAN, URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, URUSAN PENANAMAN MODAL, URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, URUSAN KETENAGA KERJAAN, URUSAN KETAHANAN PANGAN, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, URUSAN PERHUBUNGAN, URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, URUSAN PERTANAHAN, URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN, URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, URUSAN SOSIAL, URUSAN KEBUDAYAAN, URUSAN STATISTIK, URUSAN KEARSIPAN DAN URUSAN PERPUSTAKAAN

6. Catatan : Bagi SKPD yang sudah dijadwalkan dalam pembahasan LKPJ, apabila ada kegiatan/kepentingan lain atau berhalangan hadir agar kedepan untuk dikomunikasikan terlebih dahulu, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis antar lembaga di Daerah.

III. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa hampir semua SKPD yang menangani urusan wajib, sudah dapat menyajikan data secara baik dan benar serta sudah dilengkapi dengan laporan kinerja *outcome*/hasil dari programnya, sehingga kinerja urusan yang ditangani dapat diukur tingkat keberhasilan dan/atau kegagalannya **kecuali Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air** yang mendapat catatan karena adanya beberapa kegiatan yang kurang sinkron antara data yang tersaji (*kategori sangat tinggi*) dengan kenyataan yang sebenarnya (*masih terjadi banyak masalah/kasus*).

IV. SARAN DAN REKOMENDASI

a. SARAN



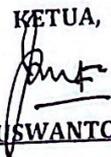
V. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Batang Pembahas LKPJ Bupati Batang Tahun 2015, kami sampaikan kepada Rapat Paripurna sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

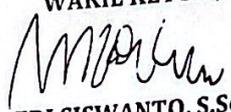
Batang, 20 April 2016

**PIMPINAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

KETUA,


H. YUSWANTO, BA

WAKIL KETUA,


EDI SISWANTO, S.Sos